

# PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN KODE ETIK HAKIM PRESPEKTIF FIQH SIYASAH

**Agung Setiawan**

PT Panggung Elektrik Citrabuana | Jl. Raya Waru No. 1 Sidoarjo  
agunghanum29@gmail.com

**Abstract:** This article discusses the role of Judicial Commission in supervising the ethical code of the judges in Indonesia from the perspective of Islamic judicial law. The position of the commission is to make sure that the judges uphold their honor and integrity. The commission is an external supervisory agency whereas the Supreme Court performs as the internal supervision of the judges. The Judicial commission in its role to supervise the judges has performed well since its establishment and contributed in the improvement of judges' judicial performance in courts. From the perspective of Islamic judicial law, the role of the Commission in upholding the ethical code of judges is in line with the Islamic judicial institution called *Wilayah al-Hisbah*. In comparison, both institutions supervise and advocate the implementation of regulation so that it can be considered ethically sound.

**Keywords:** Judicial Commission, ethical code of judge, Islamic judicial law.

**Abstrak:** Artikel ini membahas tentang peran Komisi Yudisial dalam pengawasan kode etik hakim di Indonesia dalam perspektif fiqh siyasah. Kedudukan Komisi Yudisial sebagai penegak kode etik hakim adalah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran dan martabat serta perilaku hakim. Komisi Yudisial ini sebagai pengawas eksternal, sedangkan Mahkamah Agung sebagai pengawas internal. Peran Komisi Yudisial dalam pengawasan kode etik hakim adalah terjadi peningkatan kualitas kinerja hakim dan hakim bisa menjalankan tugasnya dalam mengambil keputusan secara profesional. Dalam perspektif fiqh siyasah, peran Komisi Yudisial dalam menegakkan kode etik hakim sesuai dengan fungsi lembaga *Wilayah al-Hisbah* dalam sistem peradilan Islam. Yang pada intinya, kedua lembaga ini bertugas

mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan supaya mengikuti aturan moral (akhlak) yang baik.

**Kata Kunci:** Komisi Yudisial, kode etik hakim, *fiqh siyasah*

## Pendahuluan

Komisi yudisial merupakan lembaga negara yang terbentuk setelah adanya amandemen ke-3 terhadap UUD 1945. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri, yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.<sup>1</sup>

Dalam konteks ketatanegaraan, Komisi Yudisial mempunyai peranan yang sangat penting yaitu:

- a. Mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung.
- b. Melakukan pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif, guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.<sup>2</sup>

Komisi Yudisial juga harus memperhatikan bagaimana cara menegakkan kode etik itu sendiri, apalagi Komisi Yudisial mempunyai penghubung di beberapa wilayah yang juga harus tahu cara menegakkan kode etik tersebut agar tidak salah langkah dalam mengawasi perilaku hakim.<sup>3</sup> Mekanisme pengawasan hakim yang dilakukan Komisi Yudisial selama ini belum cukup memadai dalam mengatur kewenangan antara anggota (komisioner) dan staf pendukung (sekjen), misalnya pada tahapan pemeriksaan, yang melakukan pemeriksaan adalah anggota, hal ini berpotensi akan memperlambat kinerja Komisi Yudisial,

---

<sup>1</sup> Norma Yunita, *UUD 45 dan Amandemen*, (Jakarta: Kunci Aksara, 2014), 40.

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), 168.

<sup>3</sup> Peraturan Bersama antara Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

mengingat perbandingan jumlah hakim dengan anggota Komisi Yudisial sangat tidak sebanding.<sup>4</sup>

Kurang adanya dukungan penggunaan teknologi informasi yang memadai untuk mengelola pengaduan yang sangat melimpah, mengakibatkan Komisi Yudisial tidak maksimal dalam melakukan wewenang dan tugasnya, dan tidak jarang banyak masyarakat di daerah belum mengenal Komisi Yudisial, baik tugas dan fungsinya maupun wewenangnya.<sup>5</sup> Selain itu, pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial adalah dengan menunggu laporan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.<sup>6</sup>

Dalam peradilan Islam, ada badan pemberi peringatan dan badan pengawas, badan atau lembaga yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan yakni *Wilāyah al-Hisbah*.<sup>7</sup> Selain itu, ada juga lembaga *Wilāyah al-Mazālim* yang artinya kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan kehakiman dan *Muhtasib*,<sup>8</sup> yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan<sup>9</sup> yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat.<sup>10</sup>

Lembaga *Wilāyah al-Hisbah* ini disamping bertugas menegakkan aturan yang ada di dalam hukum, juga bertugas mengingatkan dan menegur orang-orang agar mereka mengikuti aturan moral (akhlak) yang baik, yang sangat dianjurkan di dalam

---

<sup>4</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaharuan Komisi Yudisial 2010-2025*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010), 86.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Pasal 22, UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

<sup>7</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 228.

<sup>8</sup> *Muhtasib* adalah orang atau pejabat yang bertugas memelihara hak-hak umum dan tata tertib masyarakat.

<sup>9</sup> Khalifah adalah gelar yang diberikan untuk pemimpin umat Islam.

<sup>10</sup> Muhammad Salam Madzkur, *Al-Qadhā' fi al-Islām*, (terj) Imran A.M, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982). Dikutip dalam bukunya Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, 113.

syariat Islam yaitu perbuatan haram dan tercela, tetapi tidak sampai menjatuhkan hukuman sekiranya seseorang melakukannya.<sup>11</sup> Petugas *Wilāyah al-Hisbah* disebut *Muhtasib*. Tugas dan wewenang *Muhtasib* adalah hanya menerima dan mendengarkan pengaduan dari masyarakat dan tidak berhak menerima dan memutuskan perkara yang menjadi kewenangan hakim pengadilan dan sifatnya hanya mencari kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan. Misalnya, hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, seperti mencegah penduduk membangun rumah yang mengakibatkan sempitnya jalan-jalan umum, mengganggu kelancaran lalu lintas, dan melanggar hak-hak sesama tetangga.<sup>12</sup> Sedangkan yurisdiksi *Wilāyah al-Mazālīm* fokus pada ketidakadilan yang dilakukan gubener terhadap rakyat, kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dalam penarikan pajak, mencegah perampasan harta, mengawasi harta-harta wakaf.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menarik untuk mengkaji tentang peran Komisi Yudisial dalam mengawasi kode etik hakim perspektif fiqh siyasah.

### Sejarah Komisi Yudisial

Berawal pada tahun 1968, muncul ide pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan akhir mengenai saran-saran dan atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian dan tindakan/ hukuman jabatan para hakim yang diajukan, baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Menteri Kehakiman.<sup>14</sup> Namun, dalam perjuangannya, ide tersebut menemui kegagalan sehingga tidak berhasil menjadi materi muatan Undang-Undang Nomor 14

---

<sup>11</sup> Ibid., 228.

<sup>12</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, 128.

<sup>13</sup> Ibid., 117-118.

<sup>14</sup> Idul Rishan, *Komisi Yudisial; Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, (Yogyakarta: Genta Press, 2013), 47.

Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.<sup>15</sup>

Pada tahun 1998-an muncul kembali dan menjadi wacana yang semakin kuat dan solid sejak adanya desakan penyatuan atap bagi hakim, yang tentunya memerlukan pengawasan eksternal dari lembaga yang mandiri agar cita-cita untuk mewujudkan peradilan yang jujur, bersih, transparan dan profesional dapat tercapai. Berdasarkan hal tersebut, dibentuklah Dewan Kehormatan Hakim yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi dan mutasi hakim serta menyusun kode etik bagi para hakim.<sup>16</sup>

Pasca reformasi, pada sidang tahunan MPR tahun 2001 yang membahas amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disepakati beberapa perubahan dan penambahan pasal yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman, termasuk di dalamnya Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Berdasarkan pada amandemen ketiga itulah dibentuk Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004.

Setelah melakukan seleksi ketat, terpilih 7 (tujuh) orang yang ditetapkan sebagai anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010 melalui keputusan Presiden tanggal 2 juli 2005. Pada tanggal 2 Agustus 2005, ketujuh anggota Komisi Yudisial mengucapkan sumpah di hadapan Presiden, sebagai awal memulai masa tugasnya.<sup>17</sup> Jumlah anggota ini tergolong sedikit apabila dibandingkan dengan negara-negara lain (Uni Eropa), yang mana

---

<sup>15</sup> Ibid., 48.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Komisi Yudisial, "Sejarah Komisi Yudisial", dalam <http://www.komisiyudisial.go.id>. (1 juli 2011)

jumlahnya berkisar antara 8 anggota sampai 24 (dua puluh empat) anggota.<sup>18</sup>

### **Wewenang dan Tugas Komisi Yudisial**

Wewenang Komisi Yudisial diatur dalam pasal 24B ayat 1 UUD 1945 pasca amandemen. Pasal 24B ayat 1 perubahan UUD 1945 tersebut merangkum sekaligus, fungsi, tugas dan wewenang Komisi Yudisial dalam wujud rumusan umum. Berdasarkan pokok pengaturan tersebut, UU No. 22 tahun 2004 menjabarkan fungsi strategis Komisi Yudisial melalui pasal 13 yang mana kemudian Undang-undang tersebut diperbaharui sehingga, Komisi Yudisial mempunyai wewenang;

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Komisi yudisial sebagai pengontrol dan penyeimbang (*checks and balances*) kekuasaan kehakiman, diharapkan mampu menjamin terciptanya perekrutan hakim agung yang kredibel dan menjaga hakim-hakim yang bertugas di lapangan agar tetap berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme yang melekat padanya.

Wewenang Komisi Yudisial dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung dimaksudkan untuk menghindari terjadinya politisasi perekrutan hakim agung. Secara alamiah, kekuasaan politik presiden dan parlemen selalu ingin mendudukkan orang-orangnya sebagai hakim agung. Komisi Yudisial diharapkan mampu meminimalisasi, kalau bukan mengeliminasi, terjadinya itu.<sup>19</sup>

Sesuai dengan sebutannya sebagai hakim agung, maka persyaratan keanggotaannya harus benar-benar memenuhi syarat yang ideal tentang kualifikasi hakim yang benar-benar

---

<sup>18</sup> Adi Nugroho dan M. Zaki Husein, *Komisi Yudisial di Beberapa Negara*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan-LelP), 11-15.

<sup>19</sup> Ibid., 154.

diagungkan. Mengingat kompleksitasnya persyaratan, maka proses rekrutmen hakim agung harus dilakukan secara selektif.

2. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Jabatan hakim pada dasarnya merupakan jabatan yang terhormat dan luhur yang senantiasa dijadikan figur bagi masyarakat. Hal ini mengandung arti, bahwa jabatan hakim adalah jabatan yang amanah dalam upaya penegakan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Berdasarkan itu, maka ada dua karakter yang melekat pada jabatan hakim yang harus selalu dijaga yaitu kehormatan dan keluhuran.<sup>20</sup>

Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Berkaitan dengan kondisi demikian, maka keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang dalam tugas dan fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menjadi penting terutama dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.<sup>22</sup>

3. Menetapkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung.

Seperti lembaga-lembaga profesi hukum lainnya, profesionalisme tanpa etika menjadikannya bebas dalam arti tanpa kendali dan tanpa pengarahan. Sebaliknya etika tanpa profesionalisme menjadikannya lumpuh dalam arti tidak maju

---

<sup>20</sup> Ibid., 161-162.

<sup>21</sup> SKB MA Dan KY tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Tahun 2009.

<sup>22</sup> Titik Triwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen 1945*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), 164.

bahkan tidak tegak,<sup>23</sup> sehingga dibutuhkan satu pedoman bersama bagi kalangan masing-masing profesi yang sering disebut sebagai kode etik profesi, maka dari itulah Komisi Yudisial bersama-sama dengan Mahkamah Agung membuat sebuah kode etik untuk hakim, supaya para hakim bertindak secara profesional.

4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

Hakim adalah aktor utama penegakan hukum di pengadilan yang mempunyai peran lebih dibandingkan dengan jaksa, pengacara dan panitera. Pada hakikatnya, tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya,<sup>24</sup> maka dari itulah diperlukan pengawasan terhadap perilaku hakim tersebut, agar sesuai dengan perilaku hakim yang sebenarnya, sebagai wakil tuhan.

Selain itu, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial memiliki tugas sebagai berikut;

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim;
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/ atau pedoman perilaku hakim secara tertutup;
- d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/ atau pedoman perilaku hakim;

---

<sup>23</sup> | Gede A.B Wiranata, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 250.

<sup>24</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), 16.



- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorang, kelompok dan keluhuran martabat hakim.<sup>25</sup>

### Kode Etik Hakim

Kode etik profesi hakim ialah aturan tertulis yang harus dijadikan pedoman oleh setiap hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai hakim. Pedoman tingkah laku (*code of conduct*) hakim ialah penjabaran dari kode etik profesi hakim yang menjadi pedoman bagi hakim Indonesia, baik dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum. Pedoman tingkah laku di antaranya sebagai berikut:

1. Berperilaku adil

Adil bermakna menempatkan pada sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.

2. Berperilaku jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang

---

<sup>25</sup> Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, pasal 20 A.

tidak berpihak terhadap setiap orang, baik dalam persidangan maupun luar persidangan.

3. Berperilaku arif dan bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

4. Bersikap mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun, sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Berintegritas tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

6. Bertanggung jawab

Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk

menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

7. Menjunjung tinggi harga diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparaturnya.

8. Berdisiplin tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

9. Berperilaku rendah hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempatan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

10. Bersikap profesional

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang

senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.<sup>26</sup>

### **Sanksi Pelanggaran Kode Etik**

Peranan Komisi Yudisial melakukan pengawasan perilaku hakim dapat dilakukan secara mandiri, karena tidak mempunyai hubungan administrasi, struktural, kolega maupun secara psikologis yang selama ini menjadi hambatan dalam melaksanakan pengawasan di dalam instansi atau lembaga sendiri. Hal ini tidak hanya dialami oleh Indonesia tetapi juga negara-negara lain seperti amerika dan Australia. Peranan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim terlihat dalam menentukan sanksi yang layak dijatuhkan, harus dipertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggaran, yaitu latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran tersebut terhadap lembaga peradilan ataupun pihak lain. Dari usul penjatuhan sanksi seperti teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian yang dilakukan oleh Komisi Yudisial bersifat mengikat (pasal 23 (2) UU No.22 tahun 2004). Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial (pasal 43 UU No 48 Tahun 2009). Selanjutnya usul penjatuhan sanksi tersebut diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung. Namun, usulan tersebut masih dapat dianulir oleh ketentuan yang berbunyi bahwa hakim yang akan dijatuhi sanksi diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormtan Hakim (pasal 23 (24) UU No 22 Tahun 2004).

Berdasarkan Undang-Undang terbaru, Komisi Yudisial diberi sedikit kewenangan dalam hal otoritas penjatuhan sanksi.

---

<sup>26</sup> SKB MA Dan KY tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Tahun 2009.

Pelaksanaan sanksi yang sering kontroversi, sekarang ditegaskan dalam Undang-Undang. Jika putusan Komisi Yudisial didiamkan saja dalam waktu 60 hari, hal itu otomatis berlaku dan wajib dilaksanakan Mahkamah Agung, hal ini tentunya menjadi salah satu kelebihanannya. Kalau dulu harus ditentukan oleh Mahkamah Agung, sekarang tidak lagi. Jadi ketika Komisi Yudisial menjatuhkan rekomendasi sanksi bagi hakim, Mahkamah Agung harus ikut. Kalau Mahkamah Agung tidak menjalankan rekomendasi sanksi oleh Komisi Yudisial, maka dalam waktu 60 hari rekomendasi sanksi itu berlaku secara otomatis dan wajib dijalankan oleh Mahkamah Agung.<sup>27</sup>

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap Hakim yang bersangkutan.<sup>28</sup> Apabila Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial belum mencapai kata sepakat maka usulan Komisi Yudisial sepanjang lebih dari jangka waktu 60 hari dan memenuhi ketentuan pelanggaran dalam ranah etika dan perilaku hakim, maka rekomendasi tersebut dapat berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.<sup>29</sup>

Adapun sanksi terhadap hakim yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim, sebagaimana berikut:<sup>30</sup>

- a. Sanksi ringan terdiri atas;
  - 1) Teguran lisan.
  - 2) Teguran tertulis.
  - 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. Sanksi sedang terdiri atas;

---

<sup>27</sup> Lihat pasal 22E ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

<sup>28</sup> Ibid., Pasal 22E ayat (2).

<sup>29</sup> Ibid., Pasal 22E ayat (3).

<sup>30</sup> Ibid., Pasal 22D ayat (2).

- 1) Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun.
  - 2) Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun.
  - 3) Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun.
  - 4) Hakim non palu paling lama 6 (enam) bulan.
- c. Sanksi berat terdiri atas;
- 1) Pembebasan dari jabatan structural.
  - 2) Hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun.
  - 3) Pemberhentian sementara.
  - 4) Pemberhentian tetap dengan hak pensiun.
  - 5) Pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

### **Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Kode Etik Hakim di Indonesia**

Sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antar lembaga-lembaga negara. Sistem pemerintahan negara mencakup filosofi yang menjadi dasar hubungan, pengaturan mengenai hubungan serta pembagian kewenangan dan fungsi antar lembaga negara serta intitusi lainnya yang terkait dengan gerak roda pemerintahan. Sistem pemerintahan yang dimaksud mencakup lembaga-lembaga negara, kewenangan dan fungsi lembaga-lembaga negara, hubungan lembaga negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.<sup>31</sup>

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang terbentuk setelah adanya amandemen ke-3 terhadap UUD 1945, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), 138.

<sup>32</sup> Norma Yunita, *UUD 45 dan Amandemen*, (Jakarta: Kunci Aksara, 2014), 40.

Dalam hal pengawasan perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai berbagai hambatan setelah wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang hanya sebatas memanggil, memeriksa hakim dan memberikan rekomendasi. Apalagi setelah permohonan sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang hakim agung untuk menghapuskan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi, yang berakibat kewenangan Komisi Yudisial terhadap pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak berlaku, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, Komisi Yudisial diberikan kewenangan baru yang diatur dalam Undang-Undang terbarunya, berdasarkan Revisi dari Undang-undang yang lama yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Dalam undang-undang tersebut, Komisi Yudisial mempunyai wewenang;

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim;<sup>33</sup>
- c. Menetapkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.<sup>34</sup>

Meskipun terkait struktur, Komisi Yudisial mempunyai 7 orang anggota, yang terdiri atas 2 orang mantan hakim, 2 orang praktisi hukum, 2 orang akademisi hukum dan 1 orang anggota masyarakat.<sup>35</sup> Pada dasarnya, sebagaimana dalam Undang-Undang terbarunya, wewenang Komisi Yudisial dalam mengusulkan

---

<sup>33</sup> Titik Triwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen 1945*, 152.

<sup>34</sup> Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

<sup>35</sup> Pasal 6 UU No.18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

pengangkatan hakim agung ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya politisasi perekrutan hakim agung. Secara alamiah, kekuasaan politik presiden dan parlemen selalu ingin mendudukkan orang-orangnya sebagai hakim agung. Komisi Yudisial diharapkan mampu meminimalisasi, kalau bukan mengeliminasi, terjadinya itu.<sup>36</sup>

Sesuai dengan sebutannya sebagai hakim agung, maka persyaratan keanggotaannya harus benar-benar memenuhi syarat yang ideal tentang kualifikasi hakim yang benar-benar diagungkan. Mengingat kompleksitasnya persyaratan, maka proses rekrutmen hakim agung harus dilakukan secara selektif.

Berkaitan dengan kondisi demikian, maka keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang dalam tugas dan fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menjadi penting terutama dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.<sup>37</sup>

Hakim adalah aktor utama penegakan hukum di pengadilan yang mempunyai peran lebih dibandingkan dengan jaksa, pengacara dan panetra. Pada hakikatnya, tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.<sup>38</sup> Maka dari itulah diperlukan pengawasan terhadap perilaku hakim tersebut agar sesuai dengan perilaku hakim yang sebenarnya.

Selain itu, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial memiliki tugas sebagai berikut;

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
2. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim;

---

<sup>36</sup> Ibid., 154.

<sup>37</sup> Titik Triwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen 1945*, 164.

<sup>38</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, 16.



3. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim secara tertutup;
4. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim;
5. Mengambil langkah hukum dan/atau langka lain terhadap orang perseorang, kelompok dan keluhuran martabat hakim.<sup>39</sup>

Dalam menjalankan fungsi pengawasan hakim, Komisi Yudisial mengawasi perilaku hakim dengan menerima laporan masyarakat, meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim, memeriksa hakim, dan memanggil serta meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik hakim dan selanjutnya laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Mahkamah Agung, serta ditembuskan kepada presiden dan DPR.

Komisi Yudisial dalam melaksanakan peranannya sebagai pengawas hakim tidak boleh sewenang-wenang. Komisi Yudisial wajib menaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia. Yang perlu diperhatikan juga ilah Komisi Yudisial adalah bahwa pelaksanaan tugas pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.<sup>40</sup>

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim, sesuai dengan wewenang dan tugas dalam pasal 13 huruf (b) Komisi Yudisial mempunyai wewenang dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta mejaga perilaku hakim. Selanjutnya pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 menjelaskan, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam

---

<sup>39</sup> Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, pasal 20 A.

<sup>40</sup> Titik Triwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen 1945*, 170-171.

rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Kemudian dalam pasal 21 Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.<sup>41</sup> Usul penjatuhan sanksi ini merupakan implementasi fungsi pengawasan yang bersifat represif, artinya Komisi Yudisial mempunyai hak dalam menentukan dan menilai hakim yang melakukan pelanggaran terhadap etika dan perilaku hakim yang dianggap dapat menciderai kehormatan, keluhuran dan martabat hakim.

Implikasi dari pengaturan pasal ini membawa konsekuensi terhadap pimpinan badan peradilan, baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi untuk melakukan fungsi pengendalian sebagai wujud tindak lanjut implementasi pengawasan fungsional ekstern. Sebagaimana untuk menunjang mekanisme pengawasan Komisi Yudisial dalam melaksanakan kontrol eksternal, dalam pasal 22 tentang Komisi Yudisial.<sup>42</sup>

Salah satu kewenangan Komisi Yudisial terkait dengan pemeriksaan hakim-hakim yang diduga melakukan perbuatan tercela adalah usulan pemberhentian hakim dan hakim agung, dan yang menarik adalah adanya keterlibatan unsur Komisi Yudisial dalam Majelis Kehormatan Hakim (MKH).<sup>43</sup> Selain itu untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimasuk pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Lihat Pasal 20,21, Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

<sup>42</sup> Lihat Pasal 22 Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

<sup>43</sup> Majelis Kehormatan Hakim adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bertugas memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim.

<sup>44</sup> Lihat pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

Secara garis besar, berikut ini perbandingan kewenangan Undang-Undang Komisi Yudisial yang lama dengan Undang-Undang Komisi Yudisial yang baru:

Terkait penegakan Kode Etik Perilaku Hakim ini, sejak diterbitkan keputusan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial pada tahun 2009–April 2014, Majelis Kehormatan Hakim telah dibentuk sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali, di mana dari jumlah tersebut sebanyak 16 orang hakim yang diajukan adalah atas rekomendasi dari Komisi Yudisial, sedangkan sisanya sebanyak 17 orang hakim adalah atas rekomendasi dari Mahkamah Agung.<sup>45</sup>

Dari usul penjatuhan sanksi seperti teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian yang dilakukan oleh Komisi Yudisial bersifat mengikat (pasal 23 (2) UU No.22 tahun 2004). Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial (pasal 43 UU No 48 Tahun 2009). Selanjutnya, usul penjatuhan sanksi tersebut diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung. Namun, usulan tersebut masih dapat dianulir oleh ketentuan yang berbunyi bahwa hakim yang akan dijatuhi sanksi diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim (pasal 23 (24) UU No 22 Tahun 2004).

Namun berdasarkan Undang-Undang terbaru, Komisi Yudisial diberi sedikit kewenangan dalam hal otoritas penjatuhan sanksi. Pelaksanaan sanksi yang sering kontroversi, sekarang ditegaskan dalam Undang-Undang. Jika putusan Komisi Yudisial didiamkan saja dalam waktu 60 hari, hal itu otomatis berlaku dan wajib dilaksanakan Mahkamah Agung, hal ini tentunya menjadi salah satu kelebihanannya. Kalau dulu harus ditentukan oleh Mahkamah Agung, sekarang tidak lagi. Jadi ketika Komisi Yudisial menjatuhkan rekomendasi sanksi bagi hakim, Mahkamah

---

<sup>45</sup> KYRI, *Kiprah 9 Tahun Komisi Yudisial - Menjaga Kehormatan Meningkatkan Profesionalisme*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), 76.

Agung harus ikut. Kalau Mahkamah Agung tidak menjalankan rekomendasi sanksi oleh Komisi Yudisial maka dalam waktu 60 hari rekomendasi sanksi itu berlaku secara otomatis dan wajib dijalankan oleh Mahkamah Agung.<sup>46</sup> Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap Hakim yang bersangkutan.<sup>47</sup>

Apabila Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial belum mencapai kata sepakat, maka usulan Komisi Yudisial sepanjang lebih dari jangka waktu 60 hari dan memenuhi ketentuan pelanggaran dalam ranah etika dan perilaku hakim, maka rekomendasi tersebut dapat berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.<sup>48</sup>

Adapun sanksi terhadap hakim yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan atau pedoman perilaku hakim, sebagaimana berikut:<sup>49</sup> Sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat. Hal ini menunjukkan betapa efisiennya peran dari Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas kode etik hakim di Indonesia. Komisi Yudisial sebagai pengontrol dan penyeimbang (*checks and balances*) kekuasaan kehakiman, diharapkan mampu menjamin terciptanya perekrutan hakim agung yang kredibel dan menjaga hakim-hakim yang bertugas di lapangan agar tetap berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme yang melekat padanya.

### **Analisis Fiqh Siyasah terhadap Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Kode Etik Hakim**

Dalam sejarah peradilan Islam, adanya sebuah lembaga yang bertugas melakukan pengawasan bukanlah hal yang baru lagi,

---

<sup>46</sup> Lihat pasal 22E ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

<sup>47</sup> Ibid., Pasal 22E ayat (2).

<sup>48</sup> Ibid., Pasal 22E ayat (3).

<sup>49</sup> Ibid., Pasal 22D ayat (2).

kalau dianalisis pada masa Rasulullah saw ketika beliau mengangkat seorang hakim untuk ditugaskan ke beberapa tempat mengingat luasnya wilayah kekuasaan Islam, beliau mengangkat sekaligus menugaskan Mu'az bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib menjadi gubener sekaligus sebagai hakim di Yaman. Ibn Hajar al-Asqalani menerangkan, bahwa banyak hadis yang memberi pengertian bahwa tiap-tiap daerah mempunyai hakim sendiri.<sup>50</sup> Namun perlu diketahui bahwa Rasulullah sangat teliti dalam memilih atau mengangkat sahabat dalam mengemban tugas sebagai hakim. Terbukti ketika Mu'az bin Jabal ingin diutus ke yaman, Rasulullah melakukan tes seperti yang termuat dalam hadis berikut ini:<sup>51</sup>

*Dari Muaz bin Jabal radhiyallahuanhu berkata bahwa Nabi bertanya kepadanya: Bagaimana engkau memutuskan perkara jika diajukan orang kepada engkau? Muaz menjawab: Saya akan putusan dengan kitab Allah. Nabi bertanya kembali: Bagaimana jika tidak engkau temukan dalam kitab Allah? Saya akan putusan dengan sunnah Rasulullah, jawab Muaz. Rasulullah bertanya kembali: Jika tidak engkau dapatkan dalam sunnah Rasulullah dan tidak pula dalam Kitab Allah? Muaz menjawab: saya akan berijtihad dengan pemikiran saya dan saya tidak akan berlebih-lebihan. Maka Rasulullah saw menepuk dadanya seraya bersabda: Segala puji bagi Allah yang telah menyamakan utusan dari utusan Allah sesuai dengan yang diridhai Rasulullah (HR Abu Daud).*

Namun berbeda dengan Ali bin Abi Thalib ketika diangkat oleh Rasulullah, dia tidak diuji, dikarenakan beliau sangat mengetahui kepintaran dan kecerdasannya. Awal peradilan Islam, Rasulullah mempunyai fungsi dan tugas sebagai *Musyarrif*, Qadhi, Mufti, dan *Muhtasib*.<sup>52</sup> Dalam menyampaikan syariat Islam, beliau tidak pernah memilah-milahkan fungsi yang diembannya, baik sebagai Rasul, *Musyarrif*, Qadhi, Mufti, maupun dalam kedudukannya sebagai *Muhtasib*.<sup>53</sup> Ini menunjukkan bahwa

<sup>50</sup> Ibid., 13.

<sup>51</sup> Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Penerjemah: Fadhi Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2000), 125.

<sup>52</sup> Hendi Suhendi, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 44.

<sup>53</sup> Ibid.

rasulullah saw secara tidak langsung menjadi orang yang selektif dalam memilih seorang gubenur atau hakim.

Kemudian pada masa sahabat besar, seperti Abu Bakar dan Umar bin Khathab kesejahteraan hakim sangat diperhatikan. Hal ini ditunjukkan dengan pemberian gaji tetap dan permanen, yang mana dimaksudkan agar hakim tersebut tidak terjebak oleh pemberian dalam bentuk materi (*risywah*) dan gratifikasi. Sampai-sampai khalifah Umar mengeluarkan petunjuk bahwa para hakim dilarang menerima bingkisan atau kado (sejenis parcel) dalam bentuk apa pun dari pihak-pihak yang tengah berperkara, karena hal itu dapat dianggap sebagai sogokan (*risywah*) yang semestinya dihindari oleh setiap unsur<sup>54</sup>

Dalam bidang peradilan, khalifah Umar Ibn Khathab mengeluarkan sejenis aturan prinsip atau pedoman beracara bagi hakim yang disebut dengan "*Risālah al-Qadhā'*". Upaya yang dilakukan Umar itu merupakan wujud tanggung jawab dan bentuk perhatian dari seorang khalifah untuk membekali bawahannya yang dipercaya mengemban tugas-tugas khalifah dalam bidang peradilan, sehingga pada saat itu para hakim memiliki prinsip yang jelas dalam proses penyelesaian perkara sehingga dapat meminimalisir kekeliruan dan menghindari kesewenang-wenangan penilaian subjektif hakim.<sup>55</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam hal ini ada sebuah lembaga yang mempunyai peran hampir sama dengan lembaga Komisi Yudisial, lembaga itu yakni: Lembaga *Wilayah al-Hisbah* sedangkan petugasnya adalah *Muhtasib* yang bertugas memelihara hak-hak umum dan tata tertib masyarakat. Lembaga ini mulai mendapat perhatian besar pada masa Bani Abbassiyah yakni Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Lembaga *al-Hisbah* ini memiliki tugas dan wewenang adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas *al-*

---

<sup>54</sup> Ibid., 58.

<sup>55</sup> Ibid., 60.

*hisbah*, dengan cara hanya mengawasi berlakunya undang-undang dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun.<sup>56</sup>

Dalam beberapa kasus, seorang *Muhtasib* juga bertugas seperti hakim, yaitu pada kasus-kasus yang memerlukan putusan segera. Hal ini dilakukan karena terkadang ada suatu masalah yang harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk, dan jika melalui proses pengadilan hakim akan memakan waktu yang sangat lama. Seorang *Muhtasib* tidak saja menyelesaikan sengketa atau mendengar suatu pengaduan, dia juga boleh memberi putusan terhadap suatu hal yang masuk ke dalam bidangnya. Akan tetapi, *Muhtasib* tidak mempunyai hak untuk mendengar keterangan-keterangan saksi dalam memutuskan suatu hukum dan tidak pula berhak menyuruh bersumpah terhadap orang yang menolak suatu gugatan, karena yang demikian itu termasuk dalam kewenangan hakim pengadilan.<sup>57</sup> Jadi, seorang *Muhtasib* harus mampu mengajak masyarakat menjaga ketertiban umum.

Seorang *Muhtasib* diperbolehkan memeriksa apa saja yang menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, meskipun tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara, berbeda dengan hakim yang harus menghadirkan pihak-pihak berperkara. *Muhtasib* berhak atas perlindungan negara selama-lamanya di dalam hal-hal yang tidak dimiliki hakim, karena jabatan *hisbah* dibentuk untuk menakut-nakuti, sedangkan jabatan hakim dibentuk untuk berbuat adil dan ia lebih berhak besikap lemah lembut dan ramah. Jika hakim keluar dari sifat-sifat tersebut, dan beralih kepada sifat *Muhtasib*, maka itu tidak diperbolehkan, karena kedua jabatan tersebut dibentuk untuk tugas yang berbeda.

---

<sup>56</sup> Hasbi Ash-Shiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 99.

<sup>57</sup> Ibid., 98.

Adapun hubungan antara *Muhtasib* dengan wali pidana dan adanya kemiripan yang sangat dan perbedaan yang mencolok. Adapun kemiripan yang ada pada keduanya, yaitu;

- a. Jabatan tersebut dibentuk untuk pengawasan dengan perlindungan negara.
- b. Diperbolehkan menangani hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemungkaran yang nyata.

Selain itu menurut al-Mawardi, tugas *Muhtasib* (petugas *hisbah*) adalah;<sup>58</sup>

- a. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) wajib membantu orang yang meminta pertolongan kepadanya dalam menghadapi orang lain.
- b. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) harus mencari tindakan kemungkaran yang terlihat untuk ia larang, dan memeriksa kebaikan yang ditinggalkan (tidak diamalkan) untuk ia perintahkan.
- c. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak mengangkat staf untuk melarang kemungkaran, karena ia ditugaskan untuk melarang kemungkaran, agar dengan pengangkatan staf, ia semakin lebih perkasa dan lebih kuat.
- d. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak menjatuhkan *ta'zîr* (sanksi disiplin) terhadap kemungkaran-kemungkaran yang terlihat dan tidak boleh melebihi hudud (hukuman syar'i).

Jika dibandingkan dengan lembaga Komisi Yudisial di Indonesia, maka ini hampir sama tugas dan wewenanganya, terkait dengan Undang-Undang terbarunya, yakni:

- a. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- b. Menetapkan Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung.
- c. Meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran KEPPH.

---

<sup>58</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkâm As-Sulthāniyyah*, 398-399.



- d. Mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan.
- e. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.
- f. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran KEPPH.
- g. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup.
- h. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran KEPPH.
- i. Mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorang, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
- j. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

Yang mana pada intinya kedua lembaga ini bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan supaya mengikuti aturan moral (akhlak) yang baik.

## Penutup

Dari semua penjelasan-penjelasan sebelumnya, maka dalam hal ini dapat disimpulkan sebagaimana berikut; Peran Komisi Yudisial sebagai pengawas kode etik hakim untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran dan martabat serta perilaku hakim ini sebagai pengawas eksternal, sedangkan Mahkamah Agung sebagai pengawas internal. Peran dari Komisi Yudisial ini telah banyak melakukan perubahan terhadap dunia peradilan terutama kinerja dari hakim, sehingga hakim bisa menjalankan tugasnya dalam mengambil keputusan secara profesional.

Melihat peran yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menegakkan Kode Etik Hakim, menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Hal ini sesuai dengan fungsi dari lembaga *Wilayah al-Hisbah* yang bentuk kemiripannya dalam *Wilayah al-Hisbah*, *Muhtasib* setara dengan Komisioner yang

mana merupakan pejabat Negara yang amanah dalam sejarah peradilan Islam.

## Daftar Pustaka

- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- , *Peradilan Islam*. Jakarta: AMZAH, 2012.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Cetak Biru Pembaharuan Komisi Yudisial 2010-2025*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010.
- , *Sejarah Komisi Yudisial*, dalam <http://www.komisiyudisial.go.id>. (1 juli 2011)
- , *Kiprah 9 Tahun Komisi Yudisial - Menjaga Kehormatan Meningkatkan Profesionalisme*. Jakarta: Komisi Yudisial Reuplik Indonesia, 2014.
- Madzkur, Muhammad Salam. *Al-Qadha fi al-Islam*. (terj) Imran A.M. Surabaya: Bina Ilmu, 1982.
- Mawardi (al-), Imam. *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*. Penerjemah: Fadhli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Nugroho, Adi dan M. Zaki Husein. *Komisi Yudisial di Beberapa Negara*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan-LEIP.
- Peraturan Bersama antara Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- Rishan, Idul. *Komisi Yudisial; Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*. Yogyakarta: Genta Press, 2013.
- Shiddieqi (Ash-), Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- SKB MA Dan KY tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Tahun 2009.

- Suhendi, Hendi. *Perkembangan Peradilan Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006.
- , *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen 1945*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- Wiranata, I Gede A.B. *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Yunita, Norma. *UUD 45 dan Amandemen*. Jakarta: Kunci Aksara, 2014.